



PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN



BAPPERIDA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa



HAFECs
Research &
Publication



POLICY BRIEF

Mewujudkan Asta Cita 4: Penguatan Ekosistem Pendidikan Holistik dan Inklusif melalui Integrasi Inovasi Daerah yang Berbasis Data dan Berorientasi Hasil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

(Pemerataan Akses PAUD, Penguatan Literasi dan Numerasi, Pencegahan Putus Sekolah, serta Kecakapan Digital)

Penyusun:

1. Ellyna Hafizah, M.Pd.
2. Dr. Muhammad Rahmatullah, M.Pd.
3. Ali Harun, M.Pd.
4. Farida Hayati, S.Pd.
5. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
6. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.

Tahun
2026

Mewujudkan Asta Cita 4: Penguatan Ekosistem Pendidikan Holistik dan Inklusif melalui Integrasi Inovasi Daerah yang Berbasis Data dan Berorientasi Hasil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (*Pemerataan Akses PAUD, Penguatan Literasi dan Numerasi, Pencegahan Putus Sekolah, serta Kecakapan Digital*)

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menunjukkan kemajuan pada indikator pembangunan sumber daya manusia, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,75 tahun (2020) menjadi 8,09 tahun (2024). Namun, target RLS RPJMD 2029 sebesar 8,96 tahun, serta capaian literasi dan numerasi, masih memerlukan percepatan yang signifikan. Hasil evaluasi terhadap sepuluh inovasi pendidikan prioritas mengidentifikasi adanya kesenjangan struktural pada tiga aspek utama: (1) rendahnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) terbatasnya akses terhadap perangkat dan literasi digital, serta (3) fragmentasi layanan inovasi yang belum terintegrasi dalam satu ekosistem hasil. Dokumen ini merekomendasikan penerapan model HSS CERDAS TERPADU, sebuah kerangka integrasi yang menghubungkan deteksi risiko (SIAP), layanan literasi (Pustaka Ceria Inklusif/Aksi Sekolah Literat), penanganan kasus (BERKEMAS), dan kecakapan digital (Kelas Komputer Dasar) untuk memperkuat ekosistem pendidikan dari PAUD hingga pendidikan dasar secara terukur dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten HSS Tahun 2025–2029 menetapkan sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat yang merata, dengan target RLS 8,96 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,62 tahun pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah telah melahirkan sepuluh inovasi pendidikan yang mencakup literasi dini, manajemen kehadiran, akreditasi perpustakaan, pencegahan putus sekolah, hingga pelatihan komputer dasar.

Namun demikian, evaluasi terhadap desain dan implementasi inovasi tersebut mengungkap adanya permasalahan mendasar pada dua ranah. Pertama, masih terdapat kesenjangan akses yang signifikan; sebanyak 53,74 persen anak usia 0-6 tahun belum atau tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah, dan kepemilikan komputer/laptop pada rumah tangga hanya mencapai 14,92 persen. Kedua, sebagian besar inovasi belum memiliki teori perubahan yang eksplisit, data baseline, target tahunan, maupun indikator outcome yang terukur, sehingga berisiko berhenti pada tataran administratif misalnya, akreditasi perpustakaan tanpa peningkatan penggunaan, atau pencatatan absensi tanpa mekanisme tindak lanjut.



Data dan Temuan

Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap sepuluh inovasi pendidikan Kabupaten HSS, teridentifikasi empat temuan utama sebagai berikut:

1. Kesenjangan Data Dasar dan Indikator Hasil (Outcome): Dari sepuluh inovasi yang dikaji, mayoritas belum memiliki data kuantitatif capaian yang terdokumentasi secara resmi. Hanya BERSEMANGAT (Dinas Sosial) yang memiliki data capaian lengkap (367 anak penerima bantuan, Rp801,6 juta anggaran) dan layak dijadikan rujukan praktik pencatatan. Inovasi lain seperti SIAP (Sistem Informasi Absensi PAUD) dan BERKEMAS (penanganan anak tidak sekolah) belum memiliki standar ambang risiko dan manajemen kasus per anak, sehingga efektivitasnya terhadap peningkatan partisipasi sekolah tidak dapat diverifikasi.
2. Fragmentasi dan Kurangnya Interkoneksi Layanan: Inovasi-inovasi yang ada saat ini berjalan secara terpisah. SIAP belum terhubung dengan BERKEMAS sebagai simpul rujukan anak berisiko putus sekolah. Aksi Sekolah Literat belum terintegrasi dengan Pustaka Ceria Inklusif dalam satu alur pembinaan literasi dari PAUD hingga SD. Ketidakterhubungan ini menyebabkan penerima layanan harus berulang kali mengakses program yang berbeda secara mandiri.
3. Risiko Formalisme dan Administratisasi Inovasi: Beberapa inovasi yang berorientasi pada standarisasi, seperti Aksi Sekolah Literat dan Sinergi Aksi Pustaka, berisiko berfokus pada pemenuhan dokumen akreditasi semata. Padahal, dampak nyata terhadap budaya membaca siswa dan masyarakat hanya dapat diukur melalui indikator penggunaan perpustakaan (jumlah peminjaman, kunjungan murid, dan integrasi dengan pembelajaran), bukan sekadar status akreditasi.
4. Kebutuhan Strategis akan Kecakapan Digital: Dengan kepemilikan komputer yang rendah dan penggunaan internet yang didominasi oleh telepon seluler, Kelas Komputer Dasar memiliki peran strategis. Namun, inovasi ini belum memiliki kurikulum berjenjang, asesmen kompetensi awal-akhir, dan standar keamanan digital. Tanpa penguatan substansi, pelatihan berisiko hanya menjadi seremonial tanpa peningkatan produktivitas digital peserta.

Rekomendasi Strategis

Untuk menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan percepatan target RPJMD 2029, direkomendasikan empat langkah strategis berikut:

4.1 Penerapan Model HSS CERDAS TERPADU sebagai Kerangka Integrasi

Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mengadopsi Model HSS CERDAS TERPADU. Model ini bukan bertujuan mengganti nama inovasi eksisting, melainkan menghubungkan inovasi dalam satu alur layanan: (1) Deteksi risiko melalui SIAP (absensi PAUD) yang menetapkan ambang ketidakhadiran; (2) Layanan literasi melalui Pustaka Ceria Inklusif, Aksi Sekolah Literat, dan SABTU CERDAS yang memastikan keterpaparan bahan bacaan; (3) Penanganan kasus melalui BERKEMAS dengan pendekatan manajemen kasus individual; serta (4) Penguatan kecakapan melalui Kelas Komputer Dasar. Dengan demikian, setiap anak yang terdeteksi berisiko akan memperoleh rujukan layanan yang tepat tanpa harus berpindah-pindah secara mandiri.



4.2 Standardisasi Data Dasar dan Indikator Capaian (Outcome)

BAPPERIDA diarahkan untuk menetapkan format profil inovasi yang wajib mencakup: masalah yang diselesaikan, sasaran, teori perubahan, data baseline, target tahunan, indikator outcome, dan sumber pembiayaan. Secara spesifik, Dinas Pendidikan wajib melengkapi SIAP dengan SOP peringatan dini (misalnya, ketidakhadiran 3 hari berturut-turut), dan BERKEMAS dengan sistem manajemen kasus (asesmen penyebab, rencana dukungan, dan pemantauan retensi 12 bulan).

4.3 Penguatan Penggunaan Perpustakaan dan Literasi (Perbaikan Substansi)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diarahkan untuk mengubah indikator keberhasilan Aksi Sekolah Literat dan Sinergi Aksi Pustaka dari status akreditasi menjadi ukuran penggunaan. Indikator minimum meliputi: jam buka perpustakaan, jumlah kunjungan murid/masyarakat, volume peminjaman, dan keterlibatan dalam proyek pembelajaran. Hal ini untuk mencegah risiko "akreditasi tanpa perubahan praktik".

4.4 Perlindungan Data Anak dan Pencegahan Kesenjangan Digital

Pemerintah Daerah diarahkan untuk segera menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi anak pada sistem SIAP dan data kasus BERKEMAS, mencakup hak akses terbatas dan persetujuan orang tua. Untuk mengatasi kesenjangan digital, Kelas Komputer Dasar diarahkan untuk menyediakan sesi mobile atau perangkat bersama yang dapat diakses di perpustakaan desa, serta menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang terukur.

Tahapan Implementasi

Agar rekomendasi dapat diwujudkan secara sistematis, implementasi kebijakan direkomendasikan dilaksanakan dalam dua tahapan.



Penutup

Keberhasilan perbaikan pendidikan di Kabupaten HSS tidak hanya diukur dari indikator makro semata, tetapi dari sejauh mana inovasi yang dijalankan mampu menciptakan dampak langsung: meningkatkan angka partisipasi PAUD, mencegah anak putus sekolah, dan membekali masyarakat dengan kecakapan digital yang nyata. Pemerintah Kabupaten HSS tidak perlu menambah puluhan inovasi baru; fokus utama adalah menyatukan inovasi yang telah ada ke dalam ekosistem HSS CERDAS TERPADU serta mengisi kesenjangan data agar setiap program dapat dievaluasi secara akuntabel. Langkah konkret paling mendesak adalah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun SOP peringatan dini berbasis data SIAP dan menghubungkannya secara sistemik dengan BERKEMAS, agar tidak ada anak usia sekolah yang terlambat terdeteksi dan terlewatkan dari layanan pendidikan.